

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Kota Bekasi setiap tahunnya mengalami perubahan ditandai dengan penambahan jumlah penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan. Pertambahan penduduk ini tentu dibarengi dengan penambahan jumlah perumahan yang tersebar banyak di seluruh wilayah Kota Bekasi, sehingga penduduknya padat dan ramai. Kondisi ini di satu sisi memiliki dampak atau ancaman yang membahayakan apabila terjadi kebakaran dan bencana yang tidak diduga.

Kota Bekasi sering terjadi kebakaran dan bencana. Peristiwa kebakaran sering menghanguskan beberapa rumah pemukiman penduduk bahkan juga sering terjadi bencana yang tidak diduga terjadi. Peristiwa kebakaran dan bencana biasa menimbulkan korban baik jiwa, harta, maupun kerusakan lingkungan tempat tinggal masyarakat, karena itu diperlukan kehadiran pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi, menangani dan menanggulangi terjadinya kebakaran dan bencana yang terjadi di Kota Bekasi.

Untuk menangani peristiwa kebakaran Pemerintah Kota Bekasi telah membentuk Peraturan Walikota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang pembentukannya untuk penanganan secara khusus mengenai peristiwa kebakaran. Atas dasar ini maka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, kedudukannya sebagai pembantu walikota untuk melaksanakan tugas menanggulangi kebakaran, sehingga mengembangkan fungsinya untuk menyelamatkan korban kebakaran dan bencana seminimal mungkin terjadi di Kota Bekasi.

Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dituntut mempunyai kinerja yang tinggi di dalam melakukan penanganan kebakaran dan penanggulangan bencana. Kinerja pegawai pemadam kebakaran Kota Bekasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini menunjukkan realisasi kerjanya belum mencapai target yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari data pencapaian kinerja pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Jumlah Kejadian dan Penanganan Kebakaran di Kota Bekasi
Tahun 2018 – 2020

No	Tahun	Kejadian	Penanganan	%
1	2018	270	215	79,62
2.	2019	322	270	83,85
3.	2020	189	145	76,72
	Jumlah	781	630	80,67

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pada tahun 2018 terjadi kejadian kebakaran sebanyak 270 dalam setahun dengan kerugian diperkirakan hampir mencapai 18 milyar, yang penanganannya baru sebesar 215 atau 79,62 persen, sedangkan untuk kejadian tahun 2019 terjadi kejadian kebakaran sebanyak 322 kali dalam setahun dengan kerugian diperkirakan 35 milyar, yang bisa tertangani 270 kejadian atau 83,85 % dan pada tahun 2020 terjadi kejadian kebakaran sebanyak 189 kali dalam setahun dengan perkiraan kerugian di atas 45 milyar yang penanganannya sebesar 145 atau 76,72. Jadi dapat disimpulkan penanganan kebakaran di Kota Bekasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dalam 3 tahun rata-rata baru mencapai 80,67 persen.

Berdasarkan data peristiwa kebakaran dan bencana yang terjadi dan telah ditangani oleh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, di mana terlihat

bahwa kinerja pegawai masih perlu ditingkatkan, khususnya di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai yang terlatih dan profesional untuk menangani kebakaran dan bencana untuk meminimalisasi jatuhnya korban yang tidak besar.

Permasalahan mengenai kinerja pegawai yang disoroti oleh banyak masyarakat yang terkait dengan kasus kebakaran dan bencana yang terjadi, tidak terlepas dari rendahnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menunjukkan hasil kerja yang optimal. Penilaian tentang kinerja berdasarkan kondisi ideal yang ditunjukkan dipermasalahkan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai adalah kesiapan, kesiagaan dan ketersediaan armada dan petugas yang menjalankan pekerjaan untuk menangani kebakaran dan menanggulangi bencana yang terjadi, berdasarkan Standar Operasional (SOP) yang diaktualisasikan secara kuantitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas.

Penilaian kinerja berkaitan dengan kuantitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas dari pegawai yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kondisi nyata, terlihat kinerjanya masih rendah. Ini dapat dibuktikan secara kuantitas jumlah penanganan kebakaran dan penanggulangan bencana sering terlambat direspon atas berbagai input laporan, proses penanggulangan dan tindak lanjut atas laporan penanganan kebakaran dan bencana. Secara kuantitas masyarakat menilai kinerja pegawai masih rendah dalam penanganan kebakaran dan penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Bekasi.

Permasalahan kualitas kerja yang sering dikeluhkan oleh masyarakat atas kinerja pemadam kebakaran yang selama ini dilakukan belum sesuai dengan mutu standardisasi tanggap darurat kebakaran, belum memiliki spesifikasi kerja yang profesional secara terpadu, realisasi kerja yang belum sesuai target penanganan kebakaran dan penanggulangan bencana serta kelambanan dalam menentukan prioritas kerja yang harus dilakukan dengan siap siaga menanggulangi kebakaran dan

bencana di Kota Bekasi. Hal inilah yang sering mendapatkan sorotan atau kritikan dari masyarakat atas kinerja pegawai yang belum berkualitas.

Termasuk pegawai sering dipertanyakan cara dan metode dalam penanganan kebakaran dan penanggulangan bencana yang belum efisien dalam pelaksanaannya, sehingga masih terlihat permasalahan mengenai kinerja pegawai yang belum efisien berdasarkan penyikapian pelayanan apabila terjadi kebakaran dan bencana. Masih sering terlihat pegawai belum efisien menggunakan waktu kerja yang cepat memberikan pertolongan, tepat menindaklanjuti kejadian, kurang teliti dalam mengambil keputusan, serta belum memiliki penyikapian yang tinggi dalam menghindari risiko kerja dalam melakukan penanganan kebakaran dan penanggulangan bencana di Kota Bekasi. Permasalahan ini yang sering dikeluhkan oleh masyarakat atas kinerja pegawai yang belum efisien.

Demikian halnya masyarakat sering memperlumalahkan kinerja pegawai yang belum efektif dalam penanganan kebakaran dan penanggulangan bencana. Ini bisa dilihat dari cara kerja atau tindakan kerja yang dilakukan oleh pegawai belum efektif seperti keterbatasan pegawai sebagai petugas yang memberikan pertolongan atau bantuan di lapangan, ketidaksiapan melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menjalin pemeliharaan hubungan kerjasama dalam menangani permasalahan kebakaran serta tidak adanya kesinambungan program dalam mengantisipasi setiap kejadian kebakaran. Tentu ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai belum efektif sesuai dengan manfaat dan kegunaan dari aktivitas pekerjaan yang diembannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui kegiatan pegawai dalam penanganan kebakaran. Oleh karena itu, penulis mengangkatnya ke dalam tulisan ilmiah yang berjudul “Kinerja Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemas dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan studi ilmu administrasi negara tentang kinerja pegawai.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya untuk memperluas pengetahuan bagi penulis di bidang studi ilmu administrasi negara khususnya mengenai kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
- b. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah yang terkait khususnya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dalam peningkatan kinerja pegawai.
- c. Bermanfaat bagi peneliti lanjutan menjadi informasi penting di dalam memahami mengenai penelitian yang berkaitan dengan kinerja pegawai untuk dijadikan sebagai referensi ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi penelitian yang digunakan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari penelitian relevan yang sudah pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling terkait, Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Rujukan pertama adalah Penelitian yang dilakukan Islamiati (2017: 380-389) dengan judul Fungsi Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan pola kerja Dinas Pemadam Kebakaran yang meliputi fungsi laten yang merupakan tugas pokok dan fungsi manifesto yang tidak hanya pada pelaksanaan pokok penanggulangan kebakaran. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni peneliti menekankan pada upaya pemerintah dalam penanggulangan kebakaran di permukiman yang dilakukan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara sebagai kawasan rawan kebakaran.

Rujukan ke dua adalah penelitian yang dilakukan Fatmah (2009: 99-108) dengan judul Model Mitigasi Kebakaran Berbasis Masyarakat: Kajian Kualitatif pada Aparat Pemerintah dan LSM. Hasil dari penelitian yang dilakukannya adalah memperlihatkan model menanggulangi permasalahan kebakaran yang diorganisasi aparat pemerintah dengan memberdayakan masyarakat melalui Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar). Namun model ini kurang efektif karena keorganisasian Balakar tidak berjalan disebabkan oleh faktor 42 honor, status bekerja, dan penduduk musiman. Akibatnya banyak anggota Balakar yang berhenti dan sulit merekrut anggota baru. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus penelitian berupa peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran permukiman berdasarkan tugas pokok dinas yang menangani masalah kebakaran. Sehingga tidak terfokus pada partisipasi masyarakat saja, melainkan pada aspek lain seperti pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan yang tidak terbatas pada Balakar.

Rujukan ketiga adalah penelitian yang dilakukan Pratama dan Roza (2018, 89-104) dengan judul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang dalam Penanggulangan Kebakaran. Hasil penelitian ini yakni BPBDPK Kota Padang memiliki peran sebagai penyelenggara,

peran sebagai koordinator, peran sebagai pengawas, peran sebagai fasilitator serta peran sebagai perencana. Semua peran tersebut dilaksanakan dengan baik oleh BPBDPK Kota Padang dalam menanggulangi masalah kebakaran. Meski demikian, tetap ada hambatan dalam melaksanakan peran-peran tersebut, antara lain minimnya sumber air di kota Padang, banyak hambatan ketika menuju lokasi kebakaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan sistem kerja pemadam kebakaran. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis 43 dengan topik utama mengkaji peran institusi pemerintah dalam menanggulangi masalah kebakaran di permukiman perkotaan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada wilayah penelitian yang melihat pada kelurahan dengan kerawanan kebakaran yang tinggi di Jakarta.

Rujukan ke empat adalah penelitian yang dilakukan Hidayat dan Nasution (2013: 176-191) dengan judul Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran kabupaten Deli Sedang telah berjalan baik berdasarkan Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004. Penelitian tersebut menekankan pada kapasitas aparatur pemerintahan dalam melayani masyarakat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih melihat pada upaya bagaimana pemerintah dapat menanggulangi permasalahan kebakaran di permukiman.

Rujukan kelima adalah penelitian yang dilakukan Suryadi dan Kuswandi (2014: 1-15) dengan judul Analisis Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru pada Tahun 2008-2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tugas yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dinilai cukup baik. Hal tersebut dinilai berdasarkan pada kurangnya pemberian sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran. 44 Penelitian tersebut dilakukan di Pekanbaru, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan melihat pada upaya penanggulangan kebakaran di permukiman yang berada di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini merupakan gambaran umum tentang isi proposal secara keseluruhan. Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, peneliti membuat sistematika dalam 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai topik penelitian yang diambil. Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Berupa kerangka teori yang berisi kajian teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan definisi operasional penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menuliskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang judul - judul jurnal, buku, alamat website dan produk hukum yang menjadi referensi untuk penulis.